

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2009, *Peralihan Hak atas Tanah dan Penalarannya*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Ali Achmad C., 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) jilid 1*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Effendi Perangin, 1991, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariadi, Untoro, dkk, 1995, *Tanah, Rakyat, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM-LPSM.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2005, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: Graha Indonesia.
- Josef Johannes Blitanagy, 1984, *Hukum Agraria Nasional Suatu Pembaruan Sejarah dan Sistem Hukum Politik Pertanahan*, Jakarta: Nusa Indah.
- Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Metaleiteit dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- Maria SW Sumardjono, 2009, *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Perangin Effendi, 1986, *Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Alumni Bandung 1991.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta: Karunia.
- Sujud Margono, 2004, *Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bojongkerta: Ghalia Indonesia.

### Peraturan Perundang–undangan

Undang–Undang Dasar 1945

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang - Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 19 ayat (3)

Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara

## **Jurnal**

Achmad Hilmani. 2016. "Penyelesaian Penanganan Masalah Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia Yang dikuasai Masyarakat Di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal". *Diponegoro Law Journal* 9 (2016) Vol. 6 No. 2 Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Basyirah Mustarin. 2017. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat". *Jurnal Al-Qadau* Vol. 4 No. 2 (2017) Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Edio Goetomo. 2018. "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Studi Kasus Di Kecamatan Pontianak Tenggara Dan Pontianak Utara)". *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura* Vol. 1 No. 3 (2018) Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Herculanus Richardo Lassa. 2015. "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Atas Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya)". *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 1 No. 1 (2015) Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Herlina Ratna Sambawa Ningrum. 2014. "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 1 No. 2 (2014) Semarang. Universitas Islam Sultan Agung.

Ilyas, Abdurrahman, dan Sufyan. 2015. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 65 Th. XVII (2015) Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Istijab. 2018. "Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria". *Widya Yuridika Jurnal Hukum* Vol. 1 No.1 (2018) Malang: Universitas Widyagama.

Layyin Mahfiana. 2013. "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo". *Jurnal Kodifikasi* Vol. 7 No. 1 (2013) Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Rizky Yulia Chandra, I.G.A Gangga Santi, Agung Basuki Prasetyo. 2017. "Kekuatan Hukum Grondkaart Milik PT. Kereta Api Indonesia". *Diponegoro Law Journal* 6 (2017) Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Urip Santoso. 2013. "Penyimpangan dalam Penerbitan Seritipikat Hak Atas Tanah". *Perspektif* Vol. XVIII No. 2 (2013) Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya.